

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews.com. 2014. *Hutan Rakyat Jawa Pasok 40 % Kebutuhan Kayu*. <http://www.antaraneews.com/berita/207780/hutan-rakyat-jawa-pasok-40-kebutuhan-kayu>. Diakses tanggal 5 September 2014.
- Arikunto, S. 1998a. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arikunto, S. 1998b. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Assyh, N. 2014. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Legalitas Kayu di Hutan Rakyat (Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah)*. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Awang, S.A, Santoso, H., Widayati, W.T., Nugroho, Y., Kustomo, dan Sapardiono. 2001. *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*. CV. Debut Press. Yogyakarta
- Awang, S.A., Andayani, W., Himmah, B., Widayanti, W.T., Affianto, A. 2002. *Hutan Rakyat. Sosial Ekonomi dan Pemasaran*. BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta.
- Awang, S.A. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan XI. 2008. *Potensi Kayu dan Karbon Hutan Rakyat di Pulau Jawa*. Balai Pemantapan Kawasan Hutan XI Jawa-Madura & Multistakeholder Forestry Programme. Yogyakarta.
- Bappeda Provinsi DIY. 2014. *Pembangunan Kehutanan DIY*. http://bappeda.jogjaprov.go.id/jogja_masa_depan/detail/Pembangunan-Kehutanan-DIY. Diakses tanggal 8 September 2014.
- Bass, S., Thornber, K., Markopoulos, M., Roberts, S., dan Grieg-Gran, M. 2001. *Certification's impact on forests, stakeholders and supply chain instriments for sustainable private sector forestry series*. International Institute for Enviromental and Development. London.
- Burger, D., Hess, J., dan Lang, B. 2005. *Forest Certification: An inovative instrument in the service of sustainable development?*. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Jerman.
- Bungin, B. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press. Jakarta.
- Cashore, B. 2002. *Legitimacy and Privatization of Enviromental Governance : How Non-State Market-Driven (NSMD) Governance Systems Gain Rule-*

Making Authority. Governance : An International Journal of Policy, Administrations, and Institutions. Vol 15 No 4 pp 503-529.

Cashore, B., Gale, F., Meidinger, E., dan Newsom, D. 2006. *Forest Certification In Developing And Transitioning Countries. Part of a Sustainable Future?*. *Environment* Vol 48 No 9 pp 7-25.

Cashore, B., dan Stone, M.W. 2012. *Can legality verification rescue global forest governance?. Analyzing the potential of public and private policy intersection to ameliorate forest challenges in Southeast Asia.* *Journal Forest Policy & Economic* Vol. 18 pp. 13-22.

Chambers, R. 1983. *Rural Development. Putting the Last First.* Longman Inc., New York.

Dipodiningrat, S. 2013. *Organisasi dan Sumberdaya Manusia Pendukung Pengelolaan Hutan Lestari.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik.* Penerbit Erlangga. Jakarta.

Fischer, C., Aguilar, F., Jawahar, P., dan Sedjo, R. 2005. *Forest Certification: Toward Common Standard?*. Discussion Paper. Resources for the Future. Washington DC.

Fenty. 2014. *Potensi Kayu Rakyat di Luar Jawa 912 Juta Meter Kubik.* Dimuat Pos Sore hari Senin tanggal 21 April 2014.

Forest Stewardship Council. 2004. *SLIMF Eligibility Criteria.* FSC. Jerman

Forest Stewardship Council.. 2013. *Succesful Forest Cooperative In Indonesia.* FSC. Jerman.

Gulbrandsen, L. 2005. *Sustainable Forestry in Sweden: The Effect of Competition Among Private Certification Schemes.* *The Journal of Environment & Development*, Vol. 14, No. 3, September 2005 338-355.

Gustiani, A. 2012. *Produksi, Proses Dekomposisi dan Mineralisasi Seresah pada Hutan Rakyat Nenggeran Kidul, Kab. Gunungkidul, DIY.* Tesis Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Hinrichs, A., Muhtaman, D.R. dan Irianto, N. 2008. *Forest Certification on Community Land in Indonesia.* Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Jakarta.

Humphreys, D. *Discourses as a ideology : Neoliberalism and limits of international forest policy.* *Journal Forest Policy and Economics* 11 (2009) 319-325.

- International Conference on Poverty Reduction and Forests . 2007. *Incorporating Certification into a Pro-poor Forestry Agenda: Lessons from and Options for the Asia-Pacific Region*. Scheyvens, Henry, Kazuhiro Harada dan Kimihiko Hyakumura. Bangkok.
- Johansson, J., dan Lidestav, G. 2011. *Can voluntary standards regulate forestry? — Assessing the environmental impacts offorest certification in Sweden*. Journal Forest Policy and Economics Vol 13 pp 191–198.
- Kementerian Kehutanan. 2003. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003. *Penatausahaan Hasil Hutan*. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2005. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/Menhut-II/2005. *Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak*. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2009. Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-II/2009. *Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141. Jakarta
- Kementerian Kehutanan. 2010. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 24/Menhut-II/2010. *Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 267. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2011. Peraturan Menteri Kehutanan No. 68/Menhut-II/2011. *Perubahan Atas Permenhut No. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak*. Kementerian Kehutanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 870. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2012a. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 30/Menhut-II/2012. *Penata Usahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 737. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2012b. Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Hutan Nomor : P. 01/P2H-2/2012. *Pedoman Permohonan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Rakyat Tanpa Lembaga Perantara*. Jakarta
- Kementerian Kehutanan. 2012c. Peraturan Menteri Kehutanan No. 45/Menhut-II/2012. *Perubahan Kedua Atas Atas Permenhut No. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak*. Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2013a. Siaran Pers Nomor : S. 276/PHM-1/2013. Indonesia dan Uni Eropa Tandatangani Persetujuan Bersejarah Perdagangan Kayu dari Sumber Legal. Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2013b. Peraturan Menteri Kehutanan No. 42/Menhut-II/2013. *Perubahan Ketiga Atas Atas Permenhut No. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1029. Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2014a. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 43/Menhut-II/2014. *Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak*. 19 Juni 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883. Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2014b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 95/Menhut-II/2014. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. 43/Menhut-II/2014 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak*. 22 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992. Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2014c. *Data hasil penilaian Pengelolaan Hutan produksi Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu*. <http://www.dephut.go.id>

Kementerian Kehutanan. 2014d. *Rekapitulasi V-Legal sampai dengan bulan November 2014*. <http://silk.dephut.go.id/index.php>. SILK. Jakarta

Kementerian Kehutanan. 2014e. Surat Edaran Nomor : SE. 14/VI-BPPHH/2014. *Kewajiban Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)*. 31 Desember 2014. Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015. *Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 14/VI-BPPHH/2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu*. 16 Januari 2015. Jakarta.

Lembaga Ekolabel Indonesia. 2002a. *Standar LEI 5000-3. Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari*. LEI. Bogor.

Lembaga Ekolabel Indonesia. 2002b. *Kerangka Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari*. LEI. Bogor.

- Lembaga Ekolabel Indonesia. 2002c. *Pedoman Pengajuan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari*. LEI. Bogor
- Lembaga Ekolabel Indonesia. 2005a. *Kompilasi Pengetahuan dan Pengalaman Sertifikasi Ekolabel di Indonesia*. CV Qalam. Yogyakarta.
- Lembaga Ekolabel Indonesia. 2005b. *Sertifikasi di Simping Jalan*. LEI. Bogor.
- Lembaga Ekolabel Indonesia. 2014. *FMU and Manufature LEI Certified*. LEI. Bogor.
- Lesniewska, F., dan McDermott, C.L. 2014. *FLEGT VPAs: Laying a pathway to sustainability via legality lessons from Ghana and Indonesia*. Journal Forest Policy and Economics. Article In Press.
- Lewerissa, E. 2010. *Potensi Ruang Tumbuh Ekosistem Hutan Rakyat sebagai Sumber Pangan di Kab. Gunungkidul*. Tesis Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Li, V. 2011. *The methodology to assess the competitiveness of real estate developers in China*. Queensland University of Technology.
- Low, W. D. 1970. *The cross-sectional, longitudinal and mixed longitudinal methods in the study of human growth*. Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Bd. 62, H. 3 pp. 249-258.
- Maryudi, A. 2009. *Forest Certification for Community Based Forest Management in Indonesia : Does LEI Provide a Credible Option?. Forest Conservation, Livelihoods, and Rights Projects Occasional Papers*. IGES. Japan.
- McDermott, C.L., Irland, L.C., dan Pacheco, P. 2014. *Forest certification and legality initiatives in the Brazilian Amazon: Lessons for effective and equitable forest governance*. Journal Forest Policy and Economics. Article In Press.
- McGinley, K., dan Cubbage, F.W. 2011. *Governmental regulation and nongovernmental certification of forests in the tropics: Policy, executionuptake, and overlap in Costa Rica, Guatemala, and Nicaragua*. Journal Forest Policy and Economics Vol 13 pp 206–220.
- Mindawati, N., Widiarti, A., dan Rustaman, B. 2006. *Review Hasil Penelitian Hutan Rakyat*. Puslitbang Hutan Tanaman. Balitbang Kehutanan. Bogor.
- Nawawi, H. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press. Yogyakarta.
- Nugroho, B. 2010. *Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat*. JMHT Vol. XVI, (3): 118–125, Desember 2010

- Notoatmodjo, S. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka. Jakarta.
- Obidzinski, K., Dermawan, A., Andrianto, A., Komarudin, H., dan Hernawan, D. 2014. *The timber legality verification system and the voluntary partnership agreement (VPA) in Indonesia: Challenges for the small-scale forestry sector*. Journal Forest Policy and Economics. Volume 48, November 2014, Pages 24–32
- Olsen, C., dan St George, D.M.M. 2004. *Cross-Sectional Study Design and Data Analysis*. College Entrance Examination Board. Amerika.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. *Penetapan Luas Pertanian*. 29 Desember 1960. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*. 8 Juni 2002. Jakarta.
- Pilin, M. 2002. *Mendedah Kehutanan Komunitas*. Debut Press. Jogjakarta.
- Purwowidiyanto, A. 2011. *Analisis Kelembagaan Hutan Rakyat Bersertifikasi*. Tesis Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Porter, M.E. 1985. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York.
- Rametsteiner dan Simula. 2003. *Forest Certification - an Instrument to Promote Sustainable Forest Management?* Journal of Environmental Management Vol. 67 pp 87-98.
- Silaen, S dan Widiyono. 2013. *Metode Penelitian Sosial. Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. IN MEDIA. Jakarta.
- Silalahi, S.S. 2005. *Zonasi Pola Pengembangan Hutan Rakyat di Kab. Gunungkidul*. Tesis Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Simon, H. 1999. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Cooperative Forest Management)*. Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa. BIGRAF Publishing. Yogyakarta.
- Singarimbun, M., dan Efendi, S. 1981. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Stringer, C. 2006. *Forest certification and changing global commodity chains*. Journal of Economic Geography 6 (2006) pp. 701–722
- Syahadat, E., dan Subarudi. 2007. *Kajian Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 Terhadap Efektifitas*

Penatausahaan Hasil Hutan Di Hutan Rakyat. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 4 No. 2 Juni 2007, Hal. 177 - 191

Suhardjito, D., dan Darusman, D. 1998. *Kehutanan Masyarakat. Beragam Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan*. Institut Pertanian Bogor dan The Ford Foundation. Bogor.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Penerbit Alfabeta. Bandung

Suprihadhi, A. 2012. *Unit Manajemen Hutan Tanaman Rakyat di Kab. Gunungkidul Prov DIY*. Tesis Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Press. Jakarta.

Syofi'i, A. 2014. *Dampak Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu terhadap Kelestarian Produksi Kayu Hutan Rakyat di Kab. Gunungkidul, DIY*. Tesis Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Taridala, Y., dan Adijaya, S. 2002. *Pranata Hutan Rakyat*. Debut Press, Yogyakarta.

Trison, S., dan Hero, Y. 2011. *Hutan Rakyat di Indonesia. Tinjauan Aspek Sosial, Kebijakan dan Tenurial*. Jurnal Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat Vol. 3 No. 1 Tahun 2011. Bogor.

Undang-Undang Kehutanan RI Nomor 41 Tahun 1999. *Kehutanan*. 30 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Jakarta.

Utari, A.D. 2012. *Penerapan Strategi Hutan Rakyat, Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara*. Cakrawala, Yogyakarta.

Wiersum, K.F dan Elands, B.H.M. 2013a. *Opinions on legality principles considered in the FLEGT/VPA policy in Ghana and Indonesia*. Journal Forest Policy and Economics Vol 32 pp 14–22

Wiersum, K.F., Lescuyer, G., Nketiah, K.S. dan Wit, M. 2013b. *International forest governance regimes: Reconciling concerns on timber legality and forest-based livelihoods*. Journal Forest Policy and Economics 32 pp 1–5

Widadi, A. 2012. *Sistem Informasi Manajemen Hutan Rakyat dengan WebGIS (Kasus Sebaran dan Potensi Hutan Rakyat Kab. Gunungkidul)*. Tesis Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

- Wirartha, I.M. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Wood, L. 2000. *Brands and brand equity: definition and management*. Management Decision Vol 38/9 [2000] 662-669
- Yudha, F.D. 2012. *Manajemen Hutan Rakyat : Perbandingan Hutan Rakyat Bersertifikasi Lestari dengan Hutan Rakyat Belum Bersertifikasi (Studi Kasus Hutan Rakyat di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Cianjur)*. Tesis Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.